

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 yang telah diaudit oleh BPK RI yaitu sebanyak 99 LKPD (33 Pemerintah Provinsi selama 3 tahun). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi) tahun anggaran 2012-2014 dipilih karena merupakan LKPD terbaru yang sudah lengkap dan telah dipublikasikan.

#### **B. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah dipublikasikan (Pratama, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 33 LKPD Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2012-2014. Di mana data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Pusat dan website resmi masing-masing Pemerintah Provinsi di Indonesia.

### C. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi (Sekaran, 2010). Populasi merupakan keseluruhan orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2010). Mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafiri (2012), teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti (Sekaran, 2010).

Kriteria-kriteria pemilihan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2012-2014 yang telah diaudit oleh BPK RI.
- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2012-2014 yang memperoleh opini WTP dan WDP dari BPK RI.
- 3) Menyediakan empat komponen LKPD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel di dalam penelitian ini.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang terpilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah 88 LKPD Provinsi di Indonesia tahun 2012-2014.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan metode dokumentasi. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2012-2014 dari kantor BPK RI di Jakarta Pusat dan dari website resmi masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia.

#### **E. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

##### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam komponen Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Chariri dan Ghozali (2007) Pengungkapan dalam LKPD ada 2, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Namun, penelitian ini hanya akan berfokus pada tingkat pengungkapan wajib yang dilaporkan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan pada penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010), maka dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca, penulis menggunakan sistem *scoring*. Sistem *scoring* tersebut adalah dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian, variabel dependen diukur dengan menghitung

berapa total butir pengungkapan wajib berdasarkan SAP yang diungkapkan oleh pemerintah daerah. Butir pengungkapan yang seharusnya dilaporkan tertuang dalam PSAP No. 5 sampai dengan PSAP No. 9, yaitu berjumlah 34 butir pengungkapan wajib (sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010). Pengukuran semacam ini sering disebut sebagai pengukuran indeks kepatuhan pengungkapan wajib (Suhardjanto dan Lesmana, 2010). Pengukuran variabel mengadopsi pengukuran untuk sektor privat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu oleh Suhardjanto dan Lesmana (2010).

Langkah-langkah pengukuran variabel dependen:

- 1) Memberi skor untuk setiap item pengungkapan dengan cara *dikotomi*, yaitu memberi nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan memberi nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan.
- 2) Menjumlahkan total nilai atas pengungkapan yang diperoleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga diperoleh skor total.
- 3) Menghitung indeks kepatuhan pengungkapan wajib dengan cara membagi skor total yang diungkapkan dengan skor total yang seharusnya diungkapkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang berdasar SAP.

$$DISCLO = \frac{\textit{Total Item Diungkapkan}}{\textit{Total Item yang Seharusnya Diungkapkan}}$$

## 2. Variabel Independen

### a. Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan (Setyowati, 2016). Kekayaan suatu daerah merupakan sejauh mana tingkat kesejahteraan suatu daerah (Sinaga, 2011). Tolak ukur kesejahteraan baik secara individual maupun negara akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan persepsi dari sudut mana seseorang memandangnya. Sehingga, untuk mengukur variabel kekayaan daerah, masing-masing orang bisa berbeda pula. Dengan mengadopsi pada penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) dan Sumarjo (2010), variabel kekayaan daerah diproksikan dengan PAD.

PAD merupakan penghasilan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri (Setyowati, 2016). Sumber utama PAD berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat masing-masing daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Semakin besar PAD maka menunjukkan semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan pengungkapan secara lengkap dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

$$WEALTH = \ln \text{Pendapatan Asli Daerah}$$

**b. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran suatu organisasi menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. Semakin besar organisasi biasanya akan semakin kompleks pula aturan dan ketentuan yang dimiliki. Terkait dengan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintahan maka semakin ia dikenal oleh publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin besar ukuran pemerintahan maka salah satu cara adalah dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam LKPD. Dengan mengadopsi pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Lesmana (2010) variabel ukuran pemerintah diproksikan dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Total aset didapat dari neraca, yang merupakan gabungan dari total aset lancar dan aset non lancar.

$$ASSETS = \ln \text{ Total Aset}$$

**c. Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk tetap menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dwirandra, 2008). Semakin tinggi rasio kemampuan ini, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah (Mahmudi, 2007). Dengan mengadopsi penelitian terdahulu oleh

Suhardjanto dan Lesmana (2010) serta Setyaningrum dan Syafitri (2012), variabel rasio kemandirian keuangan daerah diproksikan dengan membagi PAD dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban.

$$INDEPN = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer} + \text{Total Kewajiban}}$$

**d. *Intergovernmental Revenue***

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (Sumarjo 2010).

Dengan mengadopsi pada penelitian terdahulu oleh Patrick (2007) menghitung *intergovernmental revenue* dengan membagi total *intergovernmental revenue* dengan total pendapatan. Di Indonesia, *intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

$$IRGOVM = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### **e. Temuan Audit**

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran (Hendriyani dan Tahar, 2015). Menurut ISO (International Organization of Standardization) 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit.

Temuan audit BPK RI yang diberikan terhadap laporan keuangan setiap pemerintah daerah didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait. Semakin banyaknya temuan audit dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada LKPD diharapkan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya pemerintahan yang transparan. Transparansi ini bisa dicapai apabila item-item dalam LKPD diungkapkan sesuai dengan ketentuan pada SAP. Dengan adanya temuan audit yang kemudian akan diinformasikan pada auditee diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengungkapan pada LKPD. Hal ini



dikarenakan pemerintah daerah (*steward*) sesuai pada teori *stewardship* akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat (*principal*). Sehingga pemerintah daerah akan berusaha untuk mengungkapkan item-item secara lebih lengkap pada LKPD di periode-periode berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah temuan audit, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada penelitian Hilmi dan Martani (2010), temuan audit dihitung sesuai dengan banyaknya jumlah temuan audit yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah pada masing-masing provinsi.

$$FIND = \text{Jumlah Temuan Audit}$$

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel dan Hipotesis			
Koefisien	Variabel	Ukuran Variabel	Ekspektasi
DISCLO	Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD	<i>Checklist</i> item pengungkapan wajib (PP No 71 Tahun 2010)	Positif
WEALTH	Kekayaan Daerah	Natural logaritma pendapatan asli daerah (PAD)	Positif

Variabel dan Hipotesis			
ASSETS	Ukuran Pemerintah daerah	Natural logaritma total aset	Positif
INDEPN	Kemandirian Keuangan Daerah	PAD berbanding dengan jumlah dari total pendapatan transfer dan total kewajiban	Positif
IRGOVM	<i>Intergovernmental Revenue</i>	Total dana perimbangan berbanding dengan total pendapatan	Positif
FIND	Temuan Audit	Jumlah temuan audit BPK RI atas pemeriksaan LKPD Provinsi	Positif

## F. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur untuk menguji hipotesis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan (fakta) yang sebenarnya dari suatu penelitian, yaitu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakter variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif

hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama sekali tidak menarik kesimpulan apapun. Dengan statistic deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas serta autokorelasi. Berikut adalah rinciannya:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data yang telah diperoleh memiliki distribusi normal atau dapat dikatakan diperoleh dari populasi normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik mengatakan bahwa suatu data dikatakan berdistribusi normal, jika data tersebut jumlahnya lebih dari 30 angka. Namun untuk memastikan dilakukan uji statistik normalitas. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ini merupakan metode uji normalitas yang paling umum digunakan dalam penelitian-penelitian (Darma dan Basuki, 2015).

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel bebas atau independen (X) dalam model regresi ganda (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Model regresi yang baik adalah ketika tidak terdapat hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2011). Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016) untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan tersebut dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factors (VIF)*. Kriteria pengujiannya yaitu:

- 1) Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen jika  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$ .
- 2) Terdapat multikolinearitas antar variabel independen jika  $VIF > 10$  dan nilai *tolerance*  $< 0,1$ .

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas merupakan ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi. Di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas adalah menggunakan uji *glejser* dengan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ .

Model regresi dikatakan homoskedastisitas jika hasil  $\alpha$  lebih besar dari 5%.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada data kuisioner, di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya autokorelasi.

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (*Durbin Waston*). Pada pendekatan D-W ada nilai batas atas (dU) dan batas bawah (dL) untuk setiap tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Kriteria penilaian berdasarkan jangkauan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila  $dU < DW < (4-dU)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Apabila  $dL \leq DW \leq dU$  atau  $4-dU \geq DW \geq 4-dL$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

- 3) Apabila  $DW < dL$  (autokorelasi positif) atau  $DW > 4 - dL$  (autokorelasi negative), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

### 3. Uji Hipotesis

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel indeoenden yaitu kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan intergovernmental revenue terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehingga model persamaan regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan adalah

$$DISCLO = \alpha + \beta_1 WEALTH + \beta_2 ASSETS + \beta_3 INDEPN + \beta_4 IRGOVM + \beta_5 FIND + e$$

Keterangan :

<i>DISCLO</i>	= Tingkat Pengungkapan LKPD
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien regresi
<i>WEALTH</i>	= Kekayaan daerah
<i>ASSETS</i>	= Ukuran Pemerintah daerah
<i>INDEPN</i>	= Rasio Kemandirian

<i>IRGOVM</i>	= <i>Intergovernmental revenue</i>
<i>FIND</i>	= Temuan audit BPK RI
<i>e</i>	= Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian

Menurut Ghozali (2011) untuk mendapatkan kebenaran dari prediksi dan pengujian regresi yang dilakukan, maka diperlukan untuk mencari nilai koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial. Berikut rinciannya:

**a. Uji Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi ( Adjusted R Square) berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh model regresi mampu menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Semakin kecil nilai Adjusted R Square maka semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Menurut Ghozali (2011) banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *adjusted R<sup>2</sup>* dibandingkan menggunakan *R<sup>2</sup>*. Hal ini dikarenakan pada *R<sup>2</sup>* jika ada satu penambahan variabel independen, maka *R<sup>2</sup>* akan meningkat. Sedangkan pada *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun jika ada penambahan variabel independen dalam model regresi.

**b. Uji Simultan (Statistik F)**

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Kriteria yang digunakan adalah:

- 1)  $H_a$  diterima jika probabilitas  $<$  nilai signifikan ( $\text{Sig} \leq 0,05$ ). Artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.
- 2)  $H_a$  ditolak jika probabilitas  $>$  nilai signifikan ( $\text{Sig} \leq 0,05$ ). Artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen.

**c. Uji Parsial (Uji Statistik t)**

Statistik t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria yang digunakan untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak:

- 1)  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak jika probabilitas  $<$  nilai signifikan ( $\text{Sig.} < 0,05$ ). Artinya, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2)  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika probabilitas  $>$  nilai signifikan ( $\text{Sig.} < 0,05$ ). Artinya, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.